

## Analisis Tugas Pokok Dan Fungsi Inspektorat Dalam Pengawasan Kinerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Di Kabupaten Bungo

**Joko Setyoko<sup>1</sup>, Dwi ramadhinta. A<sup>2</sup>, Rudi Salam Sinaga<sup>3</sup>**

<sup>1,2</sup> Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Muara Bungo, Kabupaten Bungo, Propinsi Jambi

<sup>3</sup> Magister Ilmu Administrasi Publik. Universitas Medan Area.

Email : [leohisbullah@gmail.com](mailto:leohisbullah@gmail.com), [rudisalam@staff.uma.ac.id](mailto:rudisalam@staff.uma.ac.id)

### Abstrak

Inspektorat Kabupaten/Kota merupakan salah satu instansi-instansi yang melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah memiliki unsur pengawas pembinaan dan penyelenggaraan pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota yang mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah provinsi, kabupaten dan kota. Inspektorat Kabupaten Bungo berkewajiban untuk mendukung pencapaian kinerja yang dilakukan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai tugas pokok dan fungsinya. Inspektorat Kabupaten Bungo memiliki visi yaitu "Terwujudnya Pengawasan Internal yang Berkualitas, Profesional, dan Responsif, Menuju Tata Kelola Pemerintah Yang Baik Berorientasi Pelayanan publik". permasalahan yang terjadi bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan masih belum efektif karena pelaksanaan pemeriksaan kinerja pemerintahan selama ini belum sesuai. Maka dari itu penulis ingin meneliti Permasalahan yang terjadi pada Inspektorat dalam Pengawasan Kinerja pada OPD khususnya pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah. Dalam Penelitian ini yang menjadi lokasi adalah Organisasi Perangkat Daerah Inspektorat yang beralamatkan di Jalan R.M Thaher Perkantoran Bupati Muara Bungo. Waktu Penelitian adalah pada Bulan Juli 2020 sampai dengan selesai. Penulis mengambil lokasi Penelitian yaitu Inspektorat Kabupaten Bungo dikarenakan Peneliti ingin mengetahui dari analisis Inspektorat dalam Pengawasan Kinerja pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah. Dari Penelitian yang telah dilakukan penulis menemukan diantaranya, Analisis pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat dalam pengawasan kinerja BPPRD. Faktor Penghambat Inspektorat dalam Melaksanakan fungsi dan tugasnya terhadap pengawasan Kinerja BPPRD.

**Kata Kunci:** Analisis, Pengawasan, Efektif

### Abstract

The Regency/Municipal Inspectorate is one of the agencies that supervises the performance of Regional Apparatus Organizations (OPD). As the Internal Supervisory Apparatus of the Regional Government has an element of supervisor over the development and administration of provincial, regency and city regional governments which has the task of supervising the implementation of government affairs in the provincial, regency and city areas. The Bungo Regency Inspectorate is obliged to support the achievement of performance by the Regional Apparatus Organization (OPD) according to their main duties and functions. The Bungo District Inspectorate has a vision, namely "The Realization of Quality, Professional and Responsive Internal Oversight, Towards Good Public Service-Oriented Government Governance". the problem that occurs is that the implementation of the supervisory function is still not effective because the implementation of government performance audits has so far not been appropriate. Therefore the author wants to examine the problems that occur with the Inspectorate in

Oversight of Performance at OPD, especially at the Regional Tax and Retribution Management Agency. In this study, the location was the Regional Inspectorate Organization which is located at Jalan R.M Thaher, the Office of the Regent of Muara Bungo. Research time is July 2020 until completion. The author took the research location, namely the Bungo Regency Inspectorate because the researcher wanted to know from the Inspectorate's analysis in Performance Monitoring at the Regional Tax and Retribution Management Agency. From the research that has been done, the authors found, among others, an analysis of the implementation of the duties and functions of the Inspectorate in supervising BPPRD performance. Inhibiting Factors of the Inspectorate in Carrying out its functions and duties in supervising BPPRD performance.

**Keywords:** *Analysis, Monitoring, Effective*

## **PENDAHULUAN**

Salah satu dari pengawasan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yaitu tentang pengawasan fungsional. Pengawasan fungsional dilakukan meliputi beberapa aspek, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 12 ayat(2). Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 aspek-aspek tersebut adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan
2. Pelaksanaan
3. Pelaporan dan
4. Tindak lanjut hasil pengawasan.

Untuk mewujudkan otonomi daerah dan desentralisasi yang luas, nyata dan bertanggungjawab diperlukan pengawasan terhadap kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Pengawasan ini salah satunya berbentuk pengawasan intern yang dilakukan oleh inspektorat. Inspektorat Kabupaten/Kota merupakan salah satu instansi-instansi yang melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Inspektorat Kabupaten Bungo berkewajiban untuk mendukung pencapaian kinerja yang dilakukan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai tugas pokok dan fungsinya. Sebagaimana di atur dalam Perbup Bungo No. 52 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Bagan Struktur Inspektorat Kabupaten Bungo. Untuk mengoptimalkan kinerja tata kelola pemerintahan yang baik khususnya dalam pendapatan daerah serta pelayanan , diperlukan pula pengawasan yang baik. Maka dari itu Berdasarkan Latar Belakang penulis tertarik ingin melakukan penelitian yang dijadikan karya ilmiah atau skripsi yang berjudul **Analisis Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat dalam Pengawasan Kinerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (Studi Kasus Di Inspektorat Kabupaten Bungo)**

## **Tinjauan Pustaka**

### **Pengertian Tugas pokok dan Fungsi**

Tugas pokok adalah tugas yang paling pokok dari sebuah jabatan atau organisasi. Tugas pokok memberi gambaran tentang ruang lingkup atau kompleksitas jabatan atau organisasi tersebut.

Fungsi adalah perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional. Definisi lain menyebutkan bahwa fungsi adalah sekelompok aktivitas yang tergolong pada jenis yang sama berdasarkan sifat atau pelaksanaannya. Suatu organisasi menyelenggarakan fungsi-fungsi dalam rangka melaksanakan sebuah tugas pokok. Tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) adalah sasaran utama atau pekerjaan yang dibebankan kepada organisasi untuk dicapai dan dilakukan. Sebagian pihak menyebutnya sebagai tugas dan fungsi saja dan meningkatnya menjadi tusi.

Dalam setiap organisasi pemerintahan , tugas pokok dan fungsi merupakan bagian tidak terpisahkan dari keberadaan organisasi tersebut. Penetapan tugas pokok dan fungsi atas suatu unit organisasi menjadi landasan hukum unit organisasi tersebut dalam beraktifitas sekaligus sebagai rambu – rambu dalam pelaksanaan tugas dan koordinasi pada tataran aplikasi di lapangan.

### **Inspektorat Daerah**

Dalam tata aturan pemerintah di Indonesia dikenal adanya lembaga Pengawasan Pembangunan, baik pengawaasan internal maupun eksternal. Untuk tingkat kementerian dikenal adanya Irjen (Inspektorat Jendral), sebagai pengawas internal. Sedangkan pengawas eksternal adalah BPK dan BPKP. Pengawas internal di Pemerintah Provinsi dan Kabupaten pengawas internal dilakukan oleh Inspektorat Daerah yang merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Inspektorat Daerah dipimpin oleh Inspektur dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Gubernur atau Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah, diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atau Bupati sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan. Inspektorat Daerah mempunyai fungsi perencanaan program pengawasan, perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan, pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawaasan, pemeriksaan serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati di bidang pengawasan.

### **Pengertian Pengawasan**

Menurut Winardi, Pengawasan adalah semua aktivitas yang dilaksanakan oleh pihak manajer dalam upaya memastikan bahwa hasil aktual sesuai dengan hasil yang di rencanakan (winardi, 2000). Di dalam proses pengawasan juga di perlukan tahap-tahap pengawasan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Tahap-tahap pengawasan tersebut terdiri dari beberapa macam, yaitu Tahap penetapan Standar, tahap Penentuan pengukuran Pelaksanaan Kegiatan, Tahap Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan, dan Tahap Perbandingan Pelaksanaan dengan Standar dan Analisa Penyimpangan dan Tahap Pengambilan Tindakan Koreksi. Menurut Sule dan Saefullah mendefinisikan bahwa: “Pengawasan sebagai proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah di tetapkan tersebut”

Terwujudnya tujuan yang dikehendaki oleh organisasi sebenarnya tidak lain merupakan tujuan dari pengawasan. Sebab setiap kegiatan pada dasarnya selalu mempunyai tujuan tertentu. Oleh karena itu pengawasan mutlak diperlukan dalam usaha pencapaian suatu tujuan.

Menurut Situmorang dan Juhir (1994:22) maksud pengawasan adalah untuk :

1. Mengetahui jalannya pekerjaan, apakah lancar atau tidak
2. Memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan mengadakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan-kesalahan yang sama atau timbulnya kesalahan yang baru.
3. Mengetahui apakah penggunaan budget yang telah ditetapkan dalam rencana terarah kepada sasarannya dan sesuai dengan yang telah direncanakan.
4. Mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan program (fase tingkat pelaksanaan) seperti yang telah ditentukan dalam planning atau tidak
5. Mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam planning, yaitu standar.

### **Macam-macam Pengawasan**

Dalam suatu Negara terlebih-lebih Negara yang sedang berkembang atau membangun, maka kontrol atau pengawasan itu sangat urgen (beragam) atau penting baik pengawasan secara vertical, horisontal, eksternal, internal, preventif maupun represif agar maksud dan tujuan yang telah

ditetapkan tercapai. Oleh karena untuk mencapai tujuan Negara atau organisasi, maka dalam hal pengawasan ini dapat pula di klasifikasikan macam-macam pengawasan berdasarkan berbagai hal, yakni :

**a). Pengawasan langsung**

Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan secara pribadi oleh pimpinan atau pengawas dengan mengamati, meneliti, memeriksa, mengecek sendiri secara on the spot ditempat pekerjaan, dan menerima laporan-laporan secara langsung pula dari pelaksana. Hal ini dilakukan dengan inspeksi.

**b). Pengawasan tidak langsung**

Pengawasan tidak langsung diadakan dengan mempelajari laporan-laporan yang diterima dari pelaksana baik lisan maupun tertulis, mempelajari pendapat-pendapat masyarakat dan sebagainya tanpa pengawasan on the spot. Walaupun prinsip pengawasan adalah preventif, namun bila dihubungkan dengan waktu pelaksanaan pekerja, dapat di bedakan antara pengawasan preventif dan pengawasan represif.

**c. Pengawasan Preventif**

Dilakukan melalui pre audit sebelum pekerjaan dimulai. Misalnya dengan mengadakan pengawasan terhadap persiapan-persiapan rencana anggaran, rencana penggunaan tenaga dan sumber sumber lain.

**d. Pengawasan Represif**

Pengawasan represif dilakukan melalui pre audit, dengan pemeriksaan terhadap pelaksanaan dan sebagainya.

**e. Pengawasan intern**

Pengawasan yang dilakukan oleh aparat dalam organisasi itu sendiri. Akan tetapi, di dalam praktek hal ini tidak selalu mungkin terjadi. Oleh karena itu, setiap pimpinan unit dalam organisasi pada dasarnya berkewajiban membantu pucuk pimpinan mengadakan pengawasan secara fungsional sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. Pengawasan sebagai fungsi organik, built-in pada setiap jabatan pimpinan mereka harus mengawasi pimpinan melakukan pengawasan terhadap keseluruhan aparat dalam organisasi itu.

**f. Pengawasan Ekstern**

Pengawasan yang dilakukan oleh aparat luar organisasi itu sendiri, seperti halnya pengawasan dibidang keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sepanjang meliputi seluruh Aparatur Negara dan Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara terhadap departemen dan instansi pemerintah lain. Ditinjau dari segi Keseluruhan organisasi aparat pemerintah (lembaga Eksekutif), pengawasan oleh Direktorat Jenderal, Pengawasan Keuangan Negara merupakan pengawasan intern.

### **Tupoksi Inspektorat**

Dalam tata aturan pemerintahan kita kenal adanya lembaga Pengawasan Pembangunan, baik pengawasan Internal maupun Eksternal. Untuk tingkat kementerian kita kenal adanya irjen (Inspektoratral Jendral), sebagai internal. Sedangkan pengawas internal adalah BPK dan BPKB. Sedang di Pemerintah Provinsi dan Kabupaten pengawasan internal dilakukan oleh Inspektorat Daerah yang merupakan unsure pengawas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Inspektorat Daerah dipimpin oleh inspektur dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Gubernur atau Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari sekretaris Daerah, diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atau bupati sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan.

Inspektorat Daerah mempunyai fungsi perencanaan program pengawasan, peumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan, pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan, pemeriksaan serta pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Bupati di bidang pengawasan.

Untuk menyelenggarakan fungsi, Inspektorat mempunyai tugas :

1. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan
2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan perekonomian
3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan kesejahteraan social
4. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan keuangan dan asset , dan
5. Melaksanakan kegiatan ketatausahaan.

Setelah beberapa konsep diuraikan dalam hal yang berhubungan dengan kegiatan ini, maka untuk mempermudah dalam mencapai tujuan penelitian perlu disusun defenisi operasional yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam penelitian ini antara lain :

- a. Dalam keputusan presiden no 74 tahun 2001 tentang tata cara pengawasan dan penyelenggaraan Pemerintah daerah ditegaskan mengenai macam-macam pengawasan. Pengawasan fungsional merupakan kebijakan pengawasan yang digariskan oleh Presiden, kegiatan pengawasan dilaksanakan berdasarkan rencana atau program kerja pengawas tahunan.
- b. Fungsi Inspektorat Kabupaten Bungo dalam hal ini yang menjadi pembahasan yaitu pemeriksaan, pengujian, dan pengusutan atau penyelidikan.
- c. Indikator yang menjadi penilaian didalam membahas efektivitas pelaksanaan fungsi Inspektorat Kabupaten Bungo adalah tepat waktu, obyektif, dan keakuratan.
- d. Faktor-faktor yang mempengaruhi daripada pelaksanaan fungsi dan tugas pokok Inspektorat Kabupaten Bungo adalah:
  1. Aparat pengawas
  2. Sarana dan Prasaran

#### **Disiplin Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Undang-undang Nomor 53 Tahun 2010.**

##### **a. Pembinaan Disiplin**

Keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai suatu tujuan selain sangat di tentukan oleh dan mutu profesionalitas juga di tentukan oleh disiplin para anggotanya. Bagi aparatur Pemerintahan disiplin tersebut mencakup unsur-unsur ketaatan, kesetiaan, kesungguhan dalam menjalankan tugas dan kesanggupan berkorban, dalam arti mengorbankan kepentingan pribadi dan golongannya untuk kepentingan negara dan masyarakat.

Dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 43 dinyatakan bahwa "Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pidana, maka untuk menjamin tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas, diadakan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil".

Peraturan Disiplin pegawai Negeri Sipil adalah peraturan yang mengatur mengenai kewajiban, larangan, dan sanksi apabila kewajiban tidak di taati atau larangan dilanggar oleh Pegawai Negeri Sipil. Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil diatur dalam peraturan Pemerintah nomor PP 53 Tahun 2010 tentang "Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil".

## Susunan Organisasi

Susunan Organisasi Inspektorat Kabupaten Bungo , terdiri dari :

- a. Inspektur
- b. Sekretaris, membawahkan :
  1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan
  2. Subbagian Administrasi dan Umum
  3. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan
- c. Inspektur Pembantu Wilayah I
- d. Inspektur Pembantu Wilayah II
- e. Inspektur Pembantu Wilayah III
- f. Inspektur Pembantu Wilayah IV
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

## Konsep Kinerja

Kinerja merupakan kata yang diartikan sebagai penampilan , untuk kerja atau prestasi. Kinerja pada dasarnya dapat dilihat dari dua segi, yaitu kinerja individu (Pegawai) dan Kinerja organisasi.

Kinerja merupakan catatan tentang hasil hasil yang di peroleh dari fungsi-fungsi pekerjaan tertentu atau kegiatan tertentu selama kurun waktu tertentu.

## Konsep Badan Pengelola Pajak Retribusi Daerah

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang terdiri dari

1. Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari :
  - a. Pajak Daerah
  - b. Retribusi Daerah
  - c. Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan
  - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah
2. Pendapatan transfer  
Pendapatan Transfer merupakan pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain, seperti pemerintah pusat atau daerah otonom lain dalam rangka perimbangan keuangan.
3. lain-lain Pendapatan Daerah

## METODE

### Metode Penelitian

Metode penelitian berasal dari kata "*Method*" yang artinya cara yang tepat untuk melakukan sesuatu, dan *logos* artinya ilmu atau pengetahuan. Jadi metodologi artinya cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan penelitian adalah suatu keinginan untuk mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis, sampai menyusun laporannya melalui penggabungan dua pengertian di atas dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa metode penelitian adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang membicarakan dan mempersoalkan cara-cara dalam melaksanakan suatu penelitian (sugiyono, 2012). Metode yang digunakan dalam penelitian ini harus relevan dengan permasalahan yang hendak diteliti. Metode adalah cara yang dipergunakan untuk mencapai tujuan.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Nyoman Dantes, metodologi deskriptif diartikan sebagai suatu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu fenomena/peristiwa secara sistematis sesuai dengan apa adanya (nyoman,

2012). Sedangkan menurut Hamid Darmadi, metode kualitatif merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya.

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan jenis deskriptif kualitatif, karena pendekatan kualitatif sangat menarik, sebab penulis langsung ikut serta di kegiatan yang sedang diteliti, dan pendekatan kualitatif sangat mudah untuk mengumpulkan data-data, informasi, dokumentasi kegiatan yang sedang diteliti. Pendekatan kualitatif ini digunakan karena beberapa pertimbangan, yaitu bersifat tidak terlalu rinci, memberikan kemungkinan bagi perubahan-perubahan manakala ditemukan fakta yang lebih mendasar, menarik, dan unik bermakna di lapangan. Dalam penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu dengan melakukan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang atau perilaku yang diamati.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data dalam suatu penelitian. Pada penelitian kali ini peneliti memilih jenis penelitian kualitatif, maka data yang diperoleh haruslah mendalam, jelas dan spesifik. Selanjutnya dijelaskan oleh bahwa pengumpulan data dapat diperoleh dari hasilnya observasi, dokumentasi, dan wawancara (Sugiyono, 2009).

### **Wawancara**

Wawancara adalah suatu peristiwa umum dalam kehidupan sosial sebab ada banyak bentuk berbeda dari wawancara. Ada wawancara pekerjaan, wawancara media, wawancara kerja sosial, dan wawancara polisi. Metode wawancara banyak dilakukan untuk penelitian eksploratif, deskriptif, maupun eksplanatif. Metode wawancara merupakan metode yang digunakan untuk mengumpulkan data atau keterangan lisan dari seseorang yang disebut responden (sebutan untuk penelitian kuantitatif) atau informan (sebutan untuk penelitian kualitatif) melalui suatu percakapan yang sistematis dan terorganisasi. Karena itu wawancara merupakan percakapan yang berlangsung secara sistematis dan terorganisasi yang dilakukan oleh peneliti sebagai wawancara (*interview*) dengan jumlah orang dengan sejumlah orang sebagai responden atau informan yang di wawancara (*interview*) untuk mendapatkan sejumlah informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Hasil wawancara tersebut dicatat atau direkam oleh pewawancara (Ulber, 2018).

### **Observasi**

Sutrisno hadi Mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik lain, yaitu wawancara dan kusioner. Kalau wawancara dan kusioner selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga obyek-obyek alam yang lain.

Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila, penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang di amati tidak terlalu besar. Metode ini diterapkan dengan maksud supaya penulis mendapatkan informasi yang valid, akurat, dan sesuai dengan apa yang dilihat serta yang di alami. Sedangkan yang akan di observasi pada penelitian ini mengenai tugas pokok dan fungsi Inspektorat dalam mengawasi Kinerja Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Bungo.

### **Dokumen/Dokumentasi**

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya, catatan harian, sejarah kehidupan (*life Historis*), cerita, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang

berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara, akan lebih kredibel/ dapat dipercaya kalau didukung oleh dokumen/ dokumentasi.

### **Jenis-jenis Data**

Selanjutnya dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan sebagai bahan analisis adalah :

#### **Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh dari lokasi penelitian yang berupa wawancara dan data ini masih murni dan belum diolah dalam suatu proses tertentu.

#### **Data Sekunder**

Data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Atau data yang diperoleh dalam bentuk sudah diolah dan dipublikasikan yang di peroleh dari studi pustaka.

### **Teknik Pemilihan Informan**

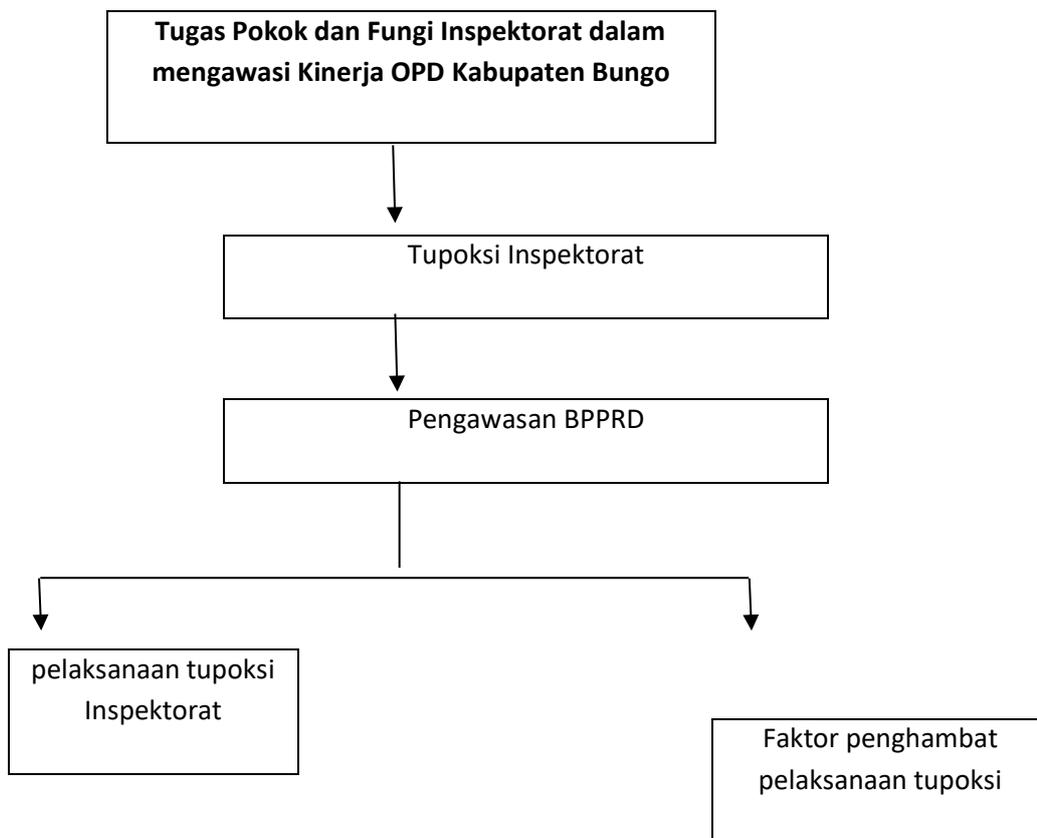
Teknik pengambilan informan dalam penelitian ini adalah dengan cara memakai teknik *purposive sampling*. Teknik *purposivesampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, pertimbangan tertentu ini, orang tersebut yang di anggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek/atau situasi sosial yang di teliti. Yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah para pejabat dan instansi terkait yaitu pejabat di kantor Inspektorat Kabupaten Bungo, serta staf pegawai kantor Inspektorat Kabupaten Bungo.

### **Analisis Data**

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang di peroleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ked lama pola, memilih mana yang penting dan yang akan di pelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah di pahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Adapun dalam proses analisa data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan, dan setelah selesai dilapangan. Analisa data menjadi pegangan bagi penelitian selanjutnya sampai jika mungkin, teori yang *grounded*. Namun dalam penelitian kualitatif, analisis data lebih di fokuskan selama proses dilapangan bersamaan dengan pengumpulan data

## Kerangka Penelitian

**Gambar. 1**  
**Kerangka Penelitian**



## Definisi Operational dan Konseptual

### Defenisi Konseptual

Adalah merupakan teori-teori dan istilah-istilah penting yang dijadikan pedoman dalam penelitian ini sehingga arahnya tidak menyimpang. Adapun istilah-istilah dan teori-teori tersebut adalah :

1. Analisa adalah sebagai kemampuan dalam memecahkan atau menguraikan suatu informasi atau materi menjadi komponen-komponen yang lebih kecil sehingga lebih mudah di jelaskan.
2. Tupoksi adalah sasaran utama atau pekerjaan yang di bebankan kepada organisasi untuk di capai dan di lakukan.
3. Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang di berikan kepadanya.
4. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah di daerah.

## **Definisi Operasional**

Adalah merupakan unsur penelitian yang menggambarkan bagaimana cara mengukur indikator penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi indikator penelitian adalah :

1. Dengan melihat analisis Inspektorat dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi dalam mengawasi Kinerja
2. Dengan melihat faktor yang menghambat Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pelaksanaan Analisis Tugas pokok dan fungsi inspektorat dalam mengawasi Kinerja Badan pengelola pajak retribusi daerah**

Pada Inspektorat dalam 1 tahun sekali sudah kewajiban untuk melakukan Pengawasan terhadap Instansi-instansi yang ada di Kabupaten Bungo dan itu merupakan kegiatan rutin. Pentingnya peran dan fungsi Badan Pengelola Pajak Retribusi Daerah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah maka perlu dilakukan penilaian terhadap pengawasan yang dilakukan Inspektorat terhadap kinerja BPPRD Kabupaten Bungo. Oleh karena itu penilaian yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Bungo terhadap kinerja Badan Pengelola Pajak Retribusi daerah Kabupaten Bungo bertujuan untuk mengukur sejauh mana pelaksanaan Kinerja dan fungsi Organisasi yang dijalankan dalam periode satu tahun berdasarkan data , laporan atau program Badan Pengelola Pajak Retribusi Daerah Kabupaten Bungo.

Dengan tujuan agar terciptanya pengawasa kinerja yang baik , Inspektorat Kabupaten Bungo fokus terhadap perencanaan program pengawasan, pelaksanaan pengawasan, penyusunan laporan hasil pengawasan, serta pertanggung jawaban hasil pengawasan

#### **1. Perencanaan Program Pengawasan Inspektorat Kabupaten Bungo**

Salah satu yang menjadi hal yang paling mendasar dalam sebuah pencapaian suatu organisasi adalah terletak dari bagaimana organisasi tersebut mampu merancang dan membuat suatu perencanaan. Sebagai lembaga pemerintahan daerah yang memiliki tujuan mengawasi jalannya pemerintahan di suatu daerah. Inspektorat Kabupaten Bungo sudah pasti memiliki sebuah perencanaan untuk bisa mengawasi jalannya pemerintahan yang ada di daerah Kabupaten Bungo khususnya BPPRD Kabupaten Bungo.

INSPEKTORAT sebelum melakukan Pemeriksaan terlebih dahulu membuat dan menetapkan perencanaan program pengawasan dalam bentuk PKPT sesuai dengan yang di jelaskan diatas. Penyusunan PKPT (Program Kerja Pengawasan Tahunan) merupakan wujud dari penerapan fungsi Inspektorat yang tertulis dalam Peraturan Bupati Bungo Nomor 52 Tahun 2016 yang menjadi tuntutan untuk dilaksanakan setiap tahunnya sebelum tahun anggaran dimulai. Namun sebelum PKPT (Program Kerja Pengawasan Tahunan) itu disetujui, Inspektorat Kabupaten Bungo terlebih dahulu membuat RPKPT (Rancangan Program Kerja Pengawasan Tahunan). Setelah RPKPT yang diusulkan oleh Inspektorat diberikan kepada Bupati dan disetujui lalu diterima usulan RPKPT tersebut , barulah RPKPT sah menjadi PKTP. Didalam pembuatan suatu perencanaan dibutuhkan sebuah pengalaman dan kompetensi. Kemampuan menganalisis kebutuhan dan juga pengawasan dalam pembuatan perencanaan tentu tidak terlepas dari mutu para pembuat perencanaan itu sendiri.

#### **2. Pelaksanaan Pengawasan Inspektorat Kabupaten Bungo pada Kinerja Badan Pengelola pajak dan retribusi Daerah**

Tahapan-tahapan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Bungo dijelaskan berdsarkan hasil wawancara dengan Bapak Zuhi selaku Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan Inspektorat Kabupaten Bungo yaitu sebagai berikut :

1. Pembentukan Tim
  - a. Didasarkan pada :
    1. Surat perintah kepala Inspektorat atas nama Bupati yang berisikan susunan tim, auditan, ruang lingkup, audit, waktu secara kewajiban yang dibebankan kepada tim
    2. Surat perintah untuk penanganan yang bersifat khusus yang berisikan susunan tim, auditan, ruang lingkup, auditin, waktu secara kewajiban yang dibebankan kepada tim.
  - b. Susunan, Wewenang dan Tanggung jawab Tim
    1. Menetapkan personal tim
    2. Menandatangani surat perintah tim atas nama Bupati
    3. melaksanakan review pelaksanaan audit
    4. Menerima ekspose hasil audit dari koordinasi dan ketua tim
    5. Menandatangani LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan)
    6. Memaraf surat Bupati
    7. Mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan audit
2. Pemberitahuan Pada Auditan

Pemberitahuan pada auditan dilakukan 2 minggu sebelum pelaksanaan pengawasan, pemberitahuan ini menyangkut kapan pemeriksaan akan dilaksanakan, lamanya pemeriksaan dan nama pemeriksa yang akan ditugaskan. Dalam pemberitahuan ini harus dilampirkan daftar permintaan informasi dan data yang akan diperlukan untuk survey pendahuluan.

3. Survey pendahuluan (Lapangan)

Pada proses sebelum dilakukan pemeriksaan langkah awal yang dilakukan oleh Inspektorat adalah melakukan survey program kerja dari satuan kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten bungo fokusnya pada Badan Pengelola Pajak retribusi Daerah dan kemudian dijadikan objek atau sasaran pemeriksaan yang dilakukan oleh tim yang mendapatkan mandate untuk menjalankan pemeriksaan. Proses ini dilakukan dengan waktu selama satu minggu sampai 15 hari.

**a. Program Kerja Pemeriksaan**

Pemeriksaan adalah pembahasan Program Kerja Pemeriksaan (PKP) dengan kepala perangkat daerah guna menjelaskan maksud dan tujuan diadakan pemeriksaan. PKP menjelaskan tentang langkah-langkah yang akan ditempuh setelah dilakukannya survey.

**b. Kertas Kerja Pemeriksaan**

Ketua tim wajib melengkapi hasil pemeriksaan dengan surat temuan, dan kertas kerja pemeriksaan serta melakukan pembahasan tentang hasil-hasil pemeriksaan dengan kepala perangkat daerah. Daftar temuan disusun berdasarkan urutan-urutan . KKP adalah catatan dan data yang dikumpulkan secara sistematis oleh kepala bidang/ketua tim selama melakukan tugas pemeriksaan, kertas kerja harus mencerminkan langkah- langkah pemeriksaan yang ditempuh penguji.

**c. Penyusunan dan Penyampaian Laporan Hasil Pengawasan**

Ketua tim wajib melakukan penyusunan LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan). LHP merupakan sasaran komunikasi resmi untuk menyampaikan seluruh informasi dari objek yang diperiksa tentang sesuatu realisasi kegiatan termaksud didalamnya menginformasikan temuan baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif dilengkapi dengan rekomendasi.

Tolak ukur pencapaian pelayanan prima kepada wajib pajak terdiri dari indikator, Realisasi indikator Persentase PAD terhadap APBD memiliki target sebesar 100% dan terealisasi sebesar 99,64% Hal tersebut tidak terlepas dari dukungan 11 Pajak daerah yaitu ( Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan retribusi daerah.

### **Faktor-faktor yang mempengaruhi Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo dalam mengawasi Kinerja pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah**

Didalam melakukan aktifitasnya sebagai pengawas fungsional terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah inspektorat Kabupaten Bungo tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan yang dilakukan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Bungo. dalam hal ini pelaksanaan PKPT terhadap kinerja BPPRD kabupaten bungo. Disini fokus kepada faktor penghambat yang mempengaruhi inspektorat Kabupaten Bungo dalam mengawasi BPPRD Kabupaten Bungo yaitu:

1. Tidak updatenya aplikasi pajak
2. Sumber Daya Manusia
3. Surat Perintah Tugas yang lambat

### **SIMPULAN**

1. Perencanaan Program Pengawasan Inspektorat Kabupaten Bungo Salah satu yang menjadi hal yang paling mendasar dalam sebuah pencapaian suatu organisasi adalah terletak dari bagaimana organisasi tersebut mampu merancang dan membuat suatu perencanaan. Sebagai lembaga pemerintahan daerah yang memiliki tujuan mengawasi jalannya pemerintahan di suatu daerah.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo dalam mengawasi Kinerja pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
  - a. Faktor penghambat yang mempengaruhi inspektorat Kabupaten Bungo dalam mengawasi BPPRD Kabupaten Bungo yaitu tidak updatenya aplikasi pajak ketika dilakukan pengawasan dan penyerahan data.
  - b. Masalah aktifasi denda pajak sering tidak ontime , harusnya cepat akurat karena sistemnya input dan itu harus tepat waktu
  - c. Kinerja ASN yang masih lemah dan tidak sama antara satu dengan yang lainnya. Sering tidak tepat waktu pada saat dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk pemeriksaan terlambat diberikan dan ini ditujukan pada orang-orang tertentu tidak pada semuanya
  - d. Temuan yang belum direspon atau ditindak lanjuti oleh BPPRD tidak diberikan sesuai dengan Surat Perintah Tugas oleh karena itu Harus diminta atau ditagih kembali

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Dantes,Nyoman, Metode Penelitian, Andi offset, Yogyakarta
- Hasan Elwi, dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka, 2005) : 285
- Manullang, 2006. *dasar-dasar manajemen* (Jakarta: Ghalia Indonesia,)
- Mudrajat Kuncoro, 2003. *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*, (Jakarta: Erlangga, ) : hal 172
- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2012): hal 427
- Silalahi, Ulber. 2015. *Metode Penelitian Sosial Kuantitatif*. Refika Aditama. Bandung
- Winardi. 2000. *Manajer & Manajemen*. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Peraturan Bupati Bungo Nomor 52 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta bagan Struktur Inspektorat Kabupaten Bungo  
<https://www.wikiapbnorg/tugas-pokok-dan-fungsi/>
- Wandi, 2014. Analisis pelaksanaan Fungsi  
<https://Pelajaran.co.id/pengertian-wawasan-menurut-sarwoto>
- Inspektorat. Makassar: Universitas Hassanuddin